

Tanggal : 27 Januari 2009 Halaman : 1  
Surat Kabar / Mj : Suara Pamboran Geografi :  
Subyek :

## Kegagalan Politik dan Pengkhianatan Intelektual

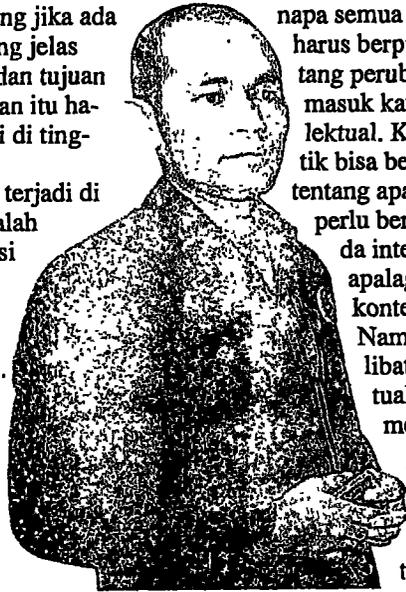
OLEH BONI HARGENS

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Dosen Ilmu Politik UI dan UK Petra Surabaya

**M**asalah kita hari ini adalah bagaimana mempertanggungjawabkan transisi politik yang belum sukses sejak tahun 1998. Betul bahwa transisi adalah kerja panjang, bukan sebuah revolusi smgkat yang radikal, melainkan kerja prosesual yang membutuhkan tahapan, langkah panjang, dan melewati situasi yang kompleks. Tetapi sepuluh tahun (1998-2008) adalah wak-

tu yang panjang jika ada suatu arus yang jelas tentang arah dan tujuan bangsa ini. Dan itu harusnya selesai di tingkat elite.

Apa yang terjadi di Indonesia adalah sebuah transisi politik yang sudah terlalu lama (1998-2008) sehingga nyaris mematahkan seluruh teori transisi politik di negara berkembang. Ini dasar ke-



napa semua komponen harus berpikir tentang perubahan, termasuk kaum intelektual. Kaum sinistik bisa bertanya tentang apakah kita perlu berharap pada intelektual, apalagi untuk konteks kita. Namun, keterlibatan intelektual dalam mendorong perubahan sosial dan politik adalah tanggung jawab not-

matif.

Intelektual tidak boleh mencuci tangan seperti Pilatus dalam sejarah pengadilan Yesus Kristus di Yerusalem. Intelektual adalah kelompok yang turut bertanggung jawab mengapa demokrasi dibunuh soehartoisme, mengapa hak asasi manusia tidak dipandang berharga selama 32 tahun, dan kenapa tentara dengan mudah membunuh orang. Ini adalah "dosa" kaum intelektual pada masa itu.

"Dosa" karena sikap diam dan/atau karena terlibat langsung dengan mengambil peran tertentu dalam lingkaran kekuasaan. Ini yang dimak-

sud dengan istilah "malaise intelektual" oleh James F Elliott (2005).

Ia membatasi "malaise intelektual" pada persoalan absennya pemikiran kritis intelektual dalam membedah persoalan dalam masyarakat.

Suatu paradoks memalukan tampak sesudah reformasi 1998, di mana para intelektual yang bertumbuh dan besar di masa Orde Baru dengan tanpa rasa malu mengaku diri "reformis, pejuang bangsa, penggagas reformasi, nabi demokrasi, dan sebagainya".

Bersambung ke hal. 5

Jika tulisan  
di bagian lain

Tanggal : 27 Januari 2009 Halaman : 1  
Surat Kabar / Mjl : Suara Pembaharuan Geografi :  
Subyek :

## ***Kegagalan Politik...*** sambungan dari halaman 1

Ada sesuatu yang terlupakan dan tak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memori, ingatan. Eddy Kristianto, (2008) melalui Sakramen Politik menyadarkan kita bahwa mempertanggungjawabkan memori adalah tuntutan esensial setiap individu dalam sebuah negara. Meskipun Kristianto lebih mengemukakan pada individu Kristiani dalam bukunya yang adalah sebuah konstruksi teologi politik kontemporer yang patut dijadikan acuan dalam mempertanggungjawabkan eksistensi setiap orang dalam sebuah masyarakat politik, mempertanggungjawabkan memori memang kerja yang tak dapat dijalankan oleh para mtelektual Orde Baru sesudah 1998.

Kristianto melihat persoalan ingatan sebagai kelemahan pejabat politik. Saya melihatnya justru ini kelemahan intelektual Indonesia. Mereka hidup pada suatu masa, menonton dan bahkan mendukung secara partisipatoris suatu rezim politik yang anti-demokratik, namun pada suatu masa pula mereka mengaku diri sebagai reformis, penyelamat Republik atau penjaga gawang moral bangsa. Itulah yang terjadi dengan intelektual Orde Baru. Sebagian intelektual era Reformasi juga mengalami masalah ingatan. Mereka berteriak antikorupsi dan menyerang pemerintah karena sikap "tebang pilih" dalam memberantas korupsi, namun diam-diam mendiamkan diri setelah diberi jabatan politik tertentu.

Ron Eyerman melalui bukunya

*Between Culture and Politics: Intellectuals in Modern Society, dan Edward W Said melalui Representation of Intellectuals: The 1993 Ruth Lectures*, memperlihatkan pada kita bahwa kaum mtelektual memiliki peran untuk dijalankan dalam sebuah masyarakat demokrasi. Eyerman mengatakan, intelektual bukan sekadar berkaitan dengan suatu stratifikasi sosial yang tertentu, melainkan berkaitan kualitas personal. Maka menjadi intelektual adalah memaikan dan menemukan kembali peran(-nya) di tengah berbagai peluang dalam suatu tradisi dan konteks sosial yang tertentu.

### **Trilogi "Dosa" Politik**

Terkait kegagalan transisi politik, yang di dalamnya praktek pengkianatan intelektual turut subur, ada tiga akar dari seluruh masalah. Ketiganya dengan jelas dipertontonkan oleh pemerintahan SBY-JK dan menjadi dasar dari seluruh "dosa" politik pemerintah, yakni kekuasaan (dijadikan tujuan pada dirinya), kekayaan (sebagai tujuan sekunder kekuasaan), dan ketenaran (sebagai prioritas). Tiga hal ini bertautan, saling menguatkan, saling menopang, dan berproses secara serentak dalam satu-kesatuan tindak yang tak tercerai-beraikan sehingga disebut trilogi. Tiga inilah akar dari seluruh kegagalan politik.

*Pertama*, kekuasaan. Ia dibaca dalam arti luas sebagai tindakan menempatkan jabatan politik, yang pada dirinya adalah titipan yang di-

percayakan rakyat untuk menciptakan kesejahteraan umum, menjadi sesuatu yang merupakan tujuan pada dirinya. Kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai alat luhur untuk kebaikan umum tetapi dilihat sebagai alat untuk arogansi pribadi elite dan bahkan untuk memperbudak mereka yang dikuasai. Ketika kekuasaan dijadikan tujuan pada dirinya, dengan mudah penguasa akan memparalelkan dirinya dengan negara. *L'etat c'est moi*, negara adalah saya, kata Louis XIV (5 September 1638-1 September 1715) dari Perancis. Louis XIV dikenal sebagai "Raja Matahari" (*the Sun King*) karena ia mengasosiasikan dirinya dengan matahari yang adalah pusat dari seluruh tata surya.

*Kedua*, kekayaan. Ia merupakan tujuan sekunder dari kekuasaan. Deskripsi ini mengacu pada penguasa politik yang cenderung memperkaya diri sendiri dan krom. Dengan kekuasaan, elite mempunyai kekuatan melakukan segala bentuk hal yang dapat meningkatkan kekayaan material pribadi dan kroni politiknya.

Pada aras tindakan, hal itu bisa dilakukan dengan "memelihara" pengusaha atau penguasa kapital yang kuat diberi kemudahan untuk berbisnis, dilindungi dari segala bentuk sanksi hukum bila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Bentuk lain dari dosa ini adalah negara menjadi bagian dari konspirasi pasar sebagai apa yang disebut komprador oleh Wallerstein.

Tanggal : 27 Januari 2009 Halaman : 1  
Surat Kabar / Mj : Suara Pembaruan Geografi :  
Subyek :

Komprador atau *compradore* dalam bahasa Portugis berarti penjual. Istilah ini mengacu pada anggota kelas pedagang Tionghoa yang membantu pedagang Barat di dalam negeri Tiongkok sejak akhir abad ke-18. Kaum-komprador ini bekerja berdasarkan kontrak tertentu. Dalam perkembangan, istilah ini sering dikenakan pada pemerintah di negara berkembang yang rentan berkompromi dengan pasar dalam mengeruk kekayaan alam di berbagai pertambangan atau dalam mempertahankan dominasi pasar kapitalis. Maka istilah "pemerintah sebagai komprador" diletakkan dalam konteks apa yang disebut kaum Marxis sebagai "kapitalisme negara" (*state capitalism*).

Istilah ini kemudian juga digunakan para kritikus di berbagai negara "demokrasi baru" yang marah melihat kedekatan negara dengan kapitalis yang dituduhnya sebagai akar dari kemundulan peran negara dalam mengontrol kebuasan dan kerakusan pasar. Apa yang terjadi di Indonesia dengan sikap pemerintah terhadap kiprah berbagai perusahaan raksasa, seperti PT Freeport di Papua atau PT Lapindo Brantas di Sidoarjo merupakan contoh nyata dari apa yang disebut "kapitalisme negara" dalam pengertian yang luas ini.

*Ketiga*, ketenaran. Popularitas adalah tujuan tersier kekuasaan. "Proses politik adalah kontes popularitas", tulis Elie Friedman dalam analisisnya di *the Jerusalem Post* edisi 3 Desember 2008. Meskipun

pembacaan Friedman terbatas pada konteks politik Israel; tapi itulah kesimpulan yang tepat atas dinamika politik demokrasi di negara manapun di dunia saat ini.

Ken Black, kolumnis di *Harian Times-Republican* di Iowa, AS, menambahkan, politik sebagai hal yang berkaitan dengan kepribadian hanyalah omongan kosong di bangku sekolah dasar, ketika kita memilih ketua kelas. Politik yang sesungguhnya menyangkut siapa yang paling banyak menyebar stiker dan membagikan pin. Politik adalah urusan siapa yang paling populer. Soal isu sudah lama ditinggalkan.

Popularitas adalah kata kunci. Popularitas berkaitan dengan peranan media massa. Media memang penting untuk komunikasi politik. Tetapi yang menjadi persoalan adalah media massa hanya dimanfaatkan sebagai sarana mendongkrak popularitas, bukan media sosialisasi dan komunikasi program kerja dan ideologi para kandidat dan partai politik dalam pemilihan umum.

Hal ini berdampak buruk karena popularitas meningkat tidak selalu mengandaikan kemampuan atau kapabilitas seorang kandidat atau suatu partai politik dalam hal kepemimpinan turut meningkat. Antara popularitas dan kualitas tidak selalu berbanding lurus. Inilah yang menjadi masalah seperti di negara kita.

Pemerintah yang mempertahankan *status quo* dalam jangka waktu yang panjang otomatis memainkan strategi penciptaan citra. Citra ter-

tentu dibangun sedemikian rupa agar dinilai dan "diterima" oleh masyarakat sebagai pemimpin yang baik dalam segala dimensi. Pemerintahan macam ini lebih mudah menjadi trani ketimbang pemerintah yang berwatak otoriter namun tak peduli dengan popularitas.

#### Populer = Otoriter?

Elite yang tergilagila dengan ketenaran atau popularitas dengan sendirinya menghindari kata "gagal" meskipun seringkali ia gagal. Sehingga lebih tepatnya, elite macam ini benci terhadap tuduhan bahwa ia gagal. Pada titik paling ekstrim, elite yang tergilagila dengan popularitas cenderung menghindari kritik dan tidak nyaman dengan protes atau perlawanan. Ia akan melarang demonstrasi jalanan, boikot, mogok massa, atau kritik tajam yang mengarah secara telak pada sosoknya sebagai pemimpin. Di garis milah, terlihat dengan jelas, bahwa elite yang tergilagila dengan popularitas mudah menjadi elite yang otoriter.

Bagaimana dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dalam konteks ini? Setiap kita, berhak menarik kesimpulan sendiri, namun satu hal pasti, bahwa pemerintahan ini telah gagal membangun demokrasi yang substansial dan lebih mementingkan citra melalui iklan politik. Menghukum pemerintah gagal adalah hak rakyat. Dan pemilu adalah kesempatan untuk membuktikan hukuman itu. ♦